

STATISTIK  
KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
*2019*





STATISTIK  
KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
*2019*

<https://lampung.bps.go.id>

## **STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2019**

**ISSN** : 0126 – 4699  
**No. Publikasi** : 18540.2013  
**Katalog BPS** : 7203007.18  
**Ukuran Buku** : 21 X 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 83 halaman

**Naskah:**  
**Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung**

**Penyunting:**  
**Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung**

**Desain Kover oleh:**  
**Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung**

**Penerbit**  
**©BPS Provinsi Lampung**

**Pencetak:**  
**CV. JAYA WIJAYA**

**Sumber Ilustrasi: freepik.com**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019, merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 dan tahun 2019 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan daerah.

Bandar Lampung, November 2020

BPS PROVINSI LAMPUNG

Kepala,



Ir. Faizal Anwar, M.T.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I. PENJELASAN UMUM .....	1
1.1. Pendahuluan .....	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	2
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI .....	5
BAB III. ULASAN RINGKAS .....	13
3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung .....	14
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung .....	17
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung .....	18
3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota .....	20
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung .....	22
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung .....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	83



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 (Juta Rupiah).....	15
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 (Juta Rupiah) .....	16
Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2018 - 2019 .....	20
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2018 - 2019 (Ribu Rupiah).....	21
Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2018 - 2019 .....	23
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 - 2019 .....	27
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 - 2019 .....	28
Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 - 2019 .....	29
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2018 - 2019 .....	30
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2018 - 2019 .....	31
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2018 - 2019 .....	32
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 2018 - 2019 .....	33
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2018 - 2019 .....	34
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2018 - 2019 .....	35
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2018 - 2019 .....	36



Tabel 11.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 2018 - 2019.....	37
Tabel 12.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2018 - 2019.....	38
Tabel 13.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2018 - 2019.....	39
Tabel 14.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2018 - 2019 .....	40
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018 - 2019.....	41
Tabel 16.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2018 - 2019.....	42
Tabel 17.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018 - 2019 .....	43
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2018 - 2019.....	44
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2018 - 2019.....	45
Tabel 20.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2018 - 2019.....	46
Tabel 21.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2018 - 2019.....	47
Tabel 22.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2018 - 2019.....	48
Tabel 23.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2018 - 2019.....	49
Tabel 24.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2018 - 2019.....	50
Tabel 25.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2018 - 2019.....	51
Tabel 26.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2018 - 2019.....	52
Tabel 27.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2018 - 2019.....	53
Tabel 28.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2018 - 2019.....	54
Tabel 29.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2018 - 2019.....	55
Tabel 30.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2018 - 2019 .....	56

Tabel 31.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018 - 2019 ...	57
Tabel 32.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2018 - 2019.....	58
Tabel 33.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018 - 2019 .....	59
Tabel 34.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2018 - 2019.....	60
Tabel 35.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2018 - 2019.....	61
Tabel 36.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 - 2019 .....	62
Tabel 37.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2018 - 2019.....	63
Tabel 38.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2018 - 2019 ...	64
Tabel 39.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 2018 - 2019.....	65
Tabel 40.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2018 - 2019...	66
Tabel 41.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2018 - 2019.....	67
Tabel 42.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2018 - 2019.....	68
Tabel 43.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 2018 - 2019.....	69
Tabel 44.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2018 - 2019.....	70
Tabel 45.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2018 - 2019.....	71
Tabel 46.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2018 - 2019 .....	72
Tabel 47.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018 - 2019.....	73
Tabel 48.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2018 - 2019.....	74
Tabel 49.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018 - 2019 .....	75
Tabel 50.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2018 - 2019.....	76

Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2018 - 2019 .....77

<https://lampung.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2019.....	17
Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2019 ....	19
Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2019 .....	22

<https://lampung.bps.go.id>



## **BAB I. PENJELASAN UMUM**

### **1.1. Pendahuluan**

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Lampung secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

## **1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data**

Data statistik keuangan daerah Provinsi Lampung diperoleh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2.

### **1.2.1. Statistik keuangan daerah tingkat provinsi**

Pencacahan statistik keuangan daerah Provinsi Lampung dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2.2. Pencacahan keuangan daerah kabupaten/kota dilakukan secara lengkap di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan daftar K-2. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di masing-masing kabupaten/kota.

### 1.2.3. Jenis daftar isian yang digunakan

#### Daftar K-1

Daftar ini digunakan untuk mencatat data statistik yang menyangkut realisasi keuangan daerah provinsi.

#### Daftar K-2

Daftar K-2 adalah jenis daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi keuangan daerah kabupaten/kota.

<https://lampung.bps.go.id>





## BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- Pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.

Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bagi Hasil Pajak:  
Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

- Bagi Hasil Bukan Pajak :

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, bagi hasil dari cukai tembakau, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

- DAU

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- DAK

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

- Lain-lain pendapatan yang sah, adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis *solvability*.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada kegiatan sektoral yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam belanja pegawai termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *multi years* dan/atau *turn key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

- Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan maksud menutup defisit atas memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.





### BAB III. ULASAN RINGKAS

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Selain itu, APBD juga merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai juga sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut, maka format APBD juga mengalami perubahan terutama di sisi belanja daerah.

### 3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah konkret untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera, dengan prioritas pada pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadi upaya prioritas untuk percepatan pertumbuhan Provinsi Lampung dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam NAWACITA (9 program pembangunan nasional), sehingga pembangunan berjalan sinergi dan penuh koordinasi. Dikutip dari Publikasi PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2015 – 2019, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,27 persen *year on year* (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 5,25 persen (yoy).

Untuk itu otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Dalam merumuskan target anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Lampung, cenderung menentukan target minimal dari sumber PAD. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 7,81 triliun rupiah, lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2018 yaitu 7,54 triliun rupiah atau naik 2,29 persen. Karena

masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik. (Tabel 3.1).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2019 dianggarkan mencapai 4,29 trilyun rupiah mengalami kenaikan 52,34 persen dari tahun 2018 yaitu sebesar 2,82 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. (Tabel 3.1).

Berdasarkan struktur belanja pemerintah daerah, belanja tidak langsung dianggarkan mencapai 4,67 trilyun rupiah mengalami kenaikan 7,37 persen dari tahun 2018 yaitu sebesar 4,34 trilyun rupiah. Sementara itu, belanja langsung tahun 2019 dianggarkan oleh pemerintah pusat mencapai 2,99 trilyun rupiah turun 6,31 persen dari realisasi tahun 2018 sebesar 3,19 trilyun rupiah. (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 (Juta Rupiah)**

Rincian	Realisasi 2018	Anggaran 2019	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>7 633 025,85</b>	<b>7 807 923,45</b>	<b>2,29</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>7 098 983,64</b>	<b>7 772 923,45</b>	<b>9,49</b>
Pendapatan Asli Daerah	2 864 235,75	3 423 635,94	19,53
Dana Perimbangan	2 816 327,38	4 290 453,09	52,34
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 418 420,51	58 834,42	(95,85)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>534 042,21</b>	<b>35 000,00</b>	<b>(93,45)</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>7 539 148,97</b>	<b>7 807 923,45</b>	<b>3,57</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4 345 688,27</b>	<b>4 666 030,80</b>	<b>7,37</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3 193 300,70</b>	<b>2 991 892,65</b>	<b>(6,31)</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>160,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93 650,00</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Perubahan dalam perencanaan anggaran suatu pemerintahan tidak selalu berdampak negatif. Hal tersebut dapat menyesuaikan situasi perekonomian, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, optimalisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan dapat mencapai target penerimaan yang telah dianggarkan. Hal ini juga terlihat pada rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2019. Dari rencana penerimaan sebesar 7,81 triliun rupiah, dalam realisasinya diperoleh 7,48 triliun rupiah atau mengalami penurunan 4,19 persen. Penurunan ini dapat menjadi evaluasi pemerintah daerah dalam melakukan penyerapan anggaran di tahun berikutnya. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran daerah tidak jauh berbeda dengan penerimaan. Realisasi anggaran lebih rendah dari yang dianggarkan tahun 2019. Hal tersebut terlihat pada perubahan seluruh komponen pendukungnya seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pembiayaan yang mengalami penurunan. Realisasi belanja langsung turun 17,87 persen menjadi 2,46 triliun rupiah dari 2,99 triliun rupiah yang dianggarkan. Sementara itu realisasi belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 1,39 persen dari rencana anggaran 4,67 triliun rupiah menjadi 4,60 triliun rupiah. (Tabel 3.2).

**Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 (Juta Rupiah)**

Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>7 807 923,45</b>	<b>7 480 984,44</b>	<b>(4,19)</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>7 772 923,45</b>	<b>7 266 993,44</b>	<b>(6,51)</b>
Pendapatan Asli Daerah	3 423 635,94	3 018 067,29	(11,85)
Dana Perimbangan	4 290 453,09	2 627 195,35	(38,77)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	58 834,42	1 621 730,80	2 656,43
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>35 000,00</b>	<b>213 991,00</b>	<b>511,40</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>7 807 923,45</b>	<b>7 144 852,06</b>	<b>(8,49)</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4 666 030,80</b>	<b>4 601 397,97</b>	<b>(1,39)</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 991 892,65</b>	<b>2 457 315,92</b>	<b>(17,87)</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>150 000,00</b>	<b>86 138,17</b>	<b>(42,57)</b>

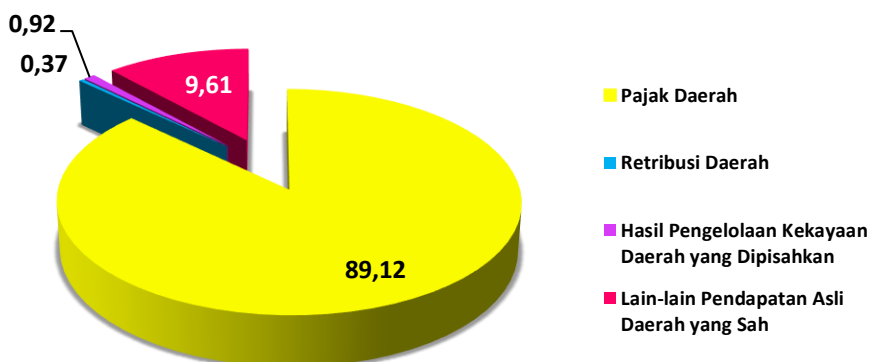
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Realisasi penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,37 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 2,86 trilyun menjadi 3,02 trilyun rupiah. (Diolah dari Tabel 3.1 Kolom 2 dan Tabel 3.2 Kolom 3).

Untuk mengukur dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2019 dengan rasio sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan sebesar 41,53 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. (Diolah dari Tabel 3.2 Kolom 3).

**Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2019**



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Dari Gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dari penerimaan pajak daerah tahun 2019 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 89,12 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,37 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah.

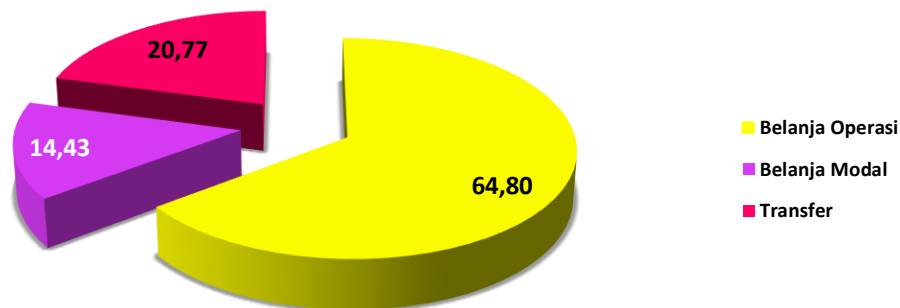
### **3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah tahun 2019, belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sebesar 64,80 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor komponen pendukung belanja operasi yang meliputi belanja bantuan sosial dan belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 94,50 persen dan 6,06 persen. (Gambar 3.2 dan diolah dari Tabel 2).

Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Hal ini terlihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total belanja keseluruhan. Rasio belanja operasi pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019 sebesar 64,80 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. (Gambar 3.2).

**Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2019**



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Dalam mengukur pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan dan menjadi perhatian. Terlihat dari rasio modal terhadap total belanja yaitu sebesar 14,43 persen. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik infrastruktur masih perlu ditingkatkan. (Gambar 3.2).

Dilihat dari kontribusinya, belanja tidak langsung tahun 2019 mengalami peningkatan. Jika tahun 2018 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 57,64 persen, maka tahun 2019 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 65,19 persen. Dengan naiknya *share* belanja tidak langsung tahun 2019, hal ini berarti pemerintah masih cenderung meningkatkan alokasi dananya untuk belanja yang terkait erat dengan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. (Tabel 3.3)



**Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2018 - 2019**

Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>57,64</b>	<b>65,19</b>
Belanja Pegawai	22,03	24,96
Belanja Bunga	0,02	0,47
Belanja Subsidi	0,02	0,01
Belanja Hibah	19,45	18,83
Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,01
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	14,97	20,67
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,09	0,23
Belanja Tidak Terduga	0,05	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>42,36</b>	<b>34,81</b>
Belanja Pegawai	2,04	2,35
Belanja Barang dan Jasa	17,37	18,09
Belanja Modal	22,94	14,37

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

### 3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan daerah otonomi baru/pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019, penerimaan daerah Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2018, penerimaan daerah tahun 2019 naik 3,45 persen dari 22,77 triliun rupiah menjadi 23,56 triliun rupiah. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah sebesar 17,44 persen dari 1,75 triliun rupiah menjadi 2,06 triliun rupiah di tahun 2019. (Tabel 3.4).

Tidak jauh berbeda dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2019 juga mengalami peningkatan 4,18 persen atau naik menjadi 22,41 triliun rupiah dari 21,51 triliun rupiah di tahun 2018. Apabila dilihat dari strukturnya, pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan hingga mencapai 52,57 persen. Adapun belanja tidak langsung yang terkait dengan program tahun 2019 juga naik 10,55 persen. (Tabel 3.4).

Optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terhadap realisasi belanja tahun 2019 dapat dilihat dari rasio belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar 83,49 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara sebesar 92,70 persen, diikuti Kabupaten Lampung Timur sebesar 89,83 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 88,33 persen. Sementara itu rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 71,39 persen. (Diolah dari Tabel 35).

**Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2018 - 2019 (Ribuan Rupiah)**

Rincian	2018	2019	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>22 774 936 527,16</b>	<b>23 560 725 703,60</b>	<b>3,45</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>21 763 769 643,82</b>	<b>22 542 810 802,06</b>	<b>3,58</b>
Pendapatan Asli Daerah	1 755 317 338,90	2 061 454 861,22	17,44
Dana Perimbangan	15 401 585 464,78	15 344 949 788,71	(0,37)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4 606 866 840,14	5 136 406 152,13	11,49
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1 011 166 883,33</b>	<b>1 017 914 901,54</b>	<b>0,67</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>21 516 002 125,31</b>	<b>22 416 144 066,69</b>	<b>4,18</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11 094 229 670,55</b>	<b>12 264 786 553,46</b>	<b>10,55</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>10 227 287 554,75</b>	<b>9 854 634 268,79</b>	<b>(3,64)</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>194 484 900,01</b>	<b>296 723 244,43</b>	<b>52,57</b>

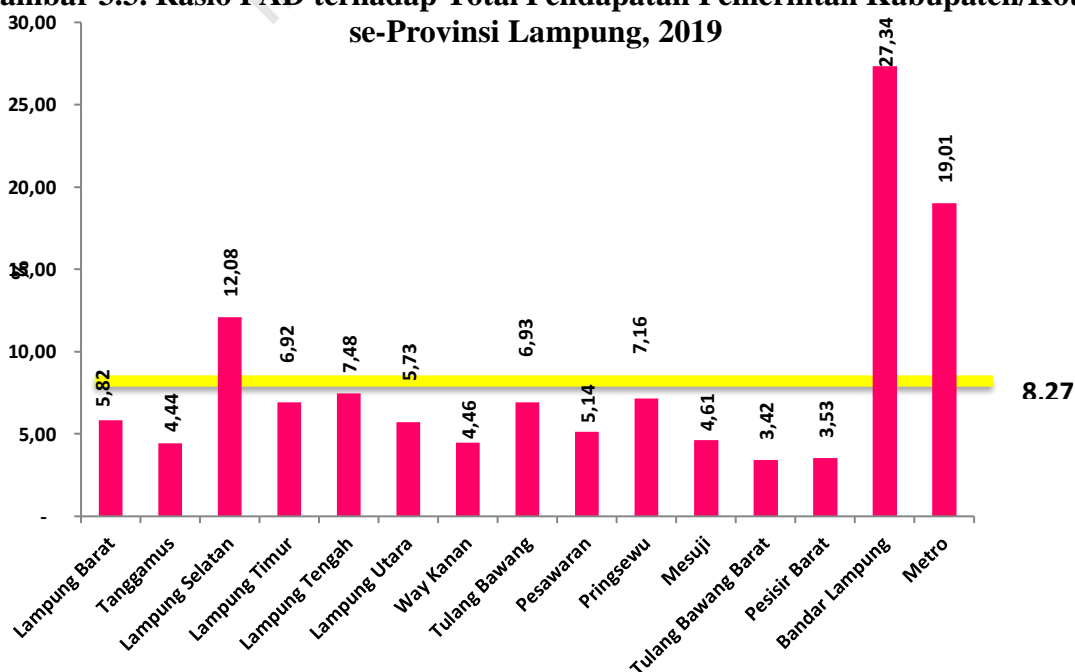
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Penerimaan pada pos PAD naik 17,44 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 1,75 triliun rupiah menjadi 2,06 triliun rupiah. Akan tetapi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 9,14 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih rendah dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Diolah dari Tabel 19).

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu 27,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki rasio kemandirian paling rendah yaitu 3,42 persen. (Gambar 3.3).

**Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2019**



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### 3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

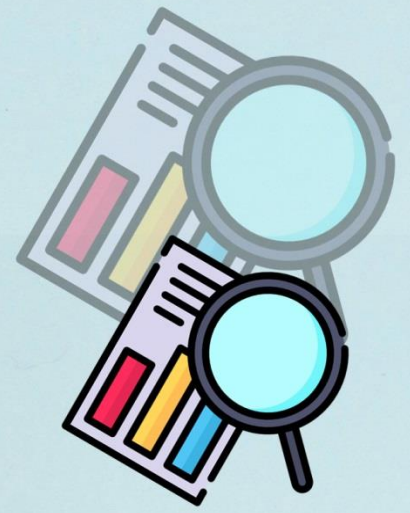
Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2019 meningkatkan kontribusi belanja tidak langsung dari 52,03 persen tahun 2018 menjadi 55,45 persen. Sementara itu, untuk belanja langsung, pemerintah kabupaten/kota justru mengurangi kontribusinya dari 47,97 persen tahun 2018 menjadi 44,55 persen tahun 2019. Dari Tabel 3.5, pemerintah kabupaten/kota meningkatkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja menjadi 37,19 persen dari 36,92 persen tahun 2018. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota masih mengalokasikan dananya untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur negara.

**Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2018 - 2019**

Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>52,03</b>	<b>55,45</b>
Belanja Pegawai	36,92	37,19
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	1,90	1,77
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,11	0,17
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11,52	15,79
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>47,97</b>	<b>44,55</b>
Belanja Pegawai	5,11	5,46
Belanja Barang dan Jasa	21,68	22,94
Belanja Modal	21,01	15,89

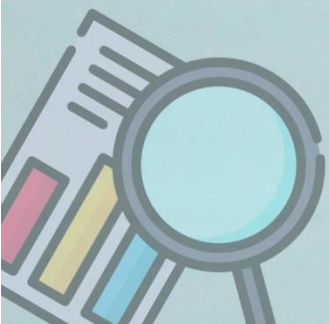
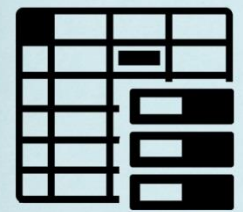
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota





# LAMPIRAN

## TABEL





**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7 098 983 642,60</b>	<b>7 266 993 438,83</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2 864 235 753,08</b>	<b>3 018 067 291,16</b>
Pajak Daerah	2 577 739 717,94	2 627 888 230,39
Retribusi Daerah	7 844 961,89	11 069 477,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27 771 046,31	27 837 905,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	250 880 026,93	351 271 677,55
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2 816 327 377,99</b>	<b>2 627 195 349,11</b>
Bagi Hasil Pajak	122 496 301,79	87 416 096,82
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	93 544 761,46	51 128 238,60
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 854 701 094,16	1 906 780 297,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	745 585 220,58	581 870 716,69
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1 418 420 511,53</b>	<b>1 621 730 798,56</b>
Pendapatan Hibah	11 870 119,34	11 362 590,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	26 756 363,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15 719 965,29	17 746 958,78
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain	1 390 830 426,90	1 565 864 886,78

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi



**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>7 538 988 966,12</b>	<b>7 058 713 889,02</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4 345 688 270,39</b>	<b>4 601 397 972,21</b>
Belanja Pegawai	1 660 859 828,14	1 761 589 035,08
Belanja Bunga	1 784 056,32	33 382 304,47
Belanja Subsidi	1 852 030,96	926 015,48
Belanja Hibah	1 466 423 924,70	1 329 394 600,51
Belanja Bantuan Sosial	529 560,00	1 030 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 128 477 614,77	1 459 179 743,87
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	81 983 574,20	15 896 272,80
Belanja Tidak Terduga	3 777 681,30	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3 193 300 695,73</b>	<b>2 457 315 916,82</b>
Belanja Pegawai	154 147 095,72	166 083 743,33
Belanja Barang dan Jasa	1 309 826 167,17	1 277 194 649,47
Belanja Modal	1 729 327 432,84	1 014 037 524,02

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 - 2019**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>533 882 206,31</b>	<b>127 852 838,34</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>534 042 206,31</b>	<b>213 991 004,69</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	54 158 268,81	93 875 534,19
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	479 883 937,50	120 115 470,50
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>160 000,00</b>	<b>86 138 166,35</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	160 000,00	15 550 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	70 588 166,35
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>( 93 783 099,69)</b>	<b>336 132 388</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

**Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 124 189 349,90</b>	<b>1 122 307 632,19</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>50 471 541,00</b>	<b>65 267 416,66</b>
Pajak Daerah	11 617 377,00	13 376 645,93
Retribusi Daerah	2 014 963,00	2 227 953,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 409 191,00	4 431 364,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33 430 010,00	45 231 452,95
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>854 830 511,90</b>	<b>791 712 917,26</b>
Bagi Hasil Pajak	12 769 138,86	10 686 260,14
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 922 139,04	5 519 994,73
Dana Alokasi Umum ( DAU )	521 743 958,00	543 777 950,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	307 395 276,00	231 728 712,39
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>218 887 297,00</b>	<b>265 327 298,26</b>
Pendapatan Hibah	48 916 520,00	67 463 454,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	57 487 256,00	70 674 988,29
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	112 483 521,00	127 188 855,98
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 539 170 374,30</b>	<b>1 711 964 522,62</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>62 350 681,08</b>	<b>76 050 778,58</b>
Pajak Daerah	17 664 599,87	20 571 076,17
Retribusi Daerah	1 180 916,15	1 536 190,32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 883 833,52	4 283 144,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39 621 331,54	49 660 367,46
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 073 484 123,68</b>	<b>1 131 249 311,79</b>
Bagi Hasil Pajak	30 166 651,41	21 674 376,40
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	22 729 667,10	28 116 118,70
Dana Alokasi Umum ( DAU )	778 605 786,00	802 326 253,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	241 982 019,17	279 132 563,69
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>403 335 569,54</b>	<b>504 664 432,25</b>
Pendapatan Hibah	61 417 480,00	94 499 444,11
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	66 034 928,00	96 009 633,89
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	275 883 161,55	314 155 354,25

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 077 357 073,14</b>	<b>2 279 592 336,84</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>215 475 629,19</b>	<b>275 464 317,22</b>
Pajak Daerah	91 955 613,77	117 851 364,60
Retribusi Daerah	9 159 993,88	10 242 771,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 783 912,08	8 927 461,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107 576 109,45	138 442 719,24
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 407 454 514,65</b>	<b>1 412 941 259,23</b>
Bagi Hasil Pajak	26 675 426,58	21 196 370,47
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 199 205,44	6 181 821,09
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 019 207 779,00	1 054 042 773,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	348 372 103,64	331 520 294,67
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>454 426 929,30</b>	<b>591 186 760,39</b>
Pendapatan Hibah	99 837 587,01	158 812 908,64
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	93 389 454,90	133 708 036,75
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35 000 000,00	295 865 815,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1 000 000,00	2 800 000,00
Dana Desa	225 199 887,40	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 051 436 100,61</b>	<b>2 132 688 979,13</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>125 035 423,32</b>	<b>147 527 535,83</b>
Pajak Daerah	53 213 791,41	62 332 058,17
Retribusi Daerah	5 715 507,22	3 925 575,23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 739 592,25	3 176 760,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63 366 532,44	78 093 142,10
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 494 906 155,71</b>	<b>1 475 128 391,94</b>
Bagi Hasil Pajak	24 368 533,38	17 012 037,83
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	45 372 438,25	26 029 815,37
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 069 168 109,00	1 106 577 701,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	355 997 075,08	325 508 837,75
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>431 494 521,59</b>	<b>510 033 051,36</b>
Pendapatan Hibah	95 549 880,00	117 993 106,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	335 944 641,59	118 332 439,36
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	273 707 506,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 622 912 022,87</b>	<b>2 588 849 568,44</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>179 370 202,74</b>	<b>193 634 175,31</b>
Pajak Daerah	72 206 626,41	92 615 976,25
Retribusi Daerah	7 085 160,83	10 498 043,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 479 910,16	6 523 066,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93 598 505,35	83 997 089,07
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 847 859 041,00</b>	<b>1 797 258 034,50</b>
Bagi Hasil Pajak	43 964 411,00	34 284 076,26
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 713 797,00	5 340 185,42
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 378 175 214,00	1 378 175 214,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	422 005 619,00	379 458 558,82
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>595 682 779,13</b>	<b>597 957 358,63</b>
Pendapatan Hibah	154 411 949,00	143 726 782,70
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	132 171 085,13	145 048 226,26
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	309 099 744,99
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	309 099 745,00	82 604,68

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 726 771 079,13</b>	<b>1 775 731 796,77</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102 289 605,03</b>	<b>101 829 440,15</b>
Pajak Daerah	24 074 684,98	25 519 982,72
Retribusi Daerah	1 904 993,28	2 232 602,63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 977 378,48	8 743 429,75
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67 332 548,29	65 333 425,05
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 206 059 795,86</b>	<b>1 244 666 930,85</b>
Bagi Hasil Pajak	16 353 712,24	13 101 497,62
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 671 168,50	5 257 973,42
Dana Alokasi Umum ( DAU )	949 531 402,00	981 730 753,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	226 503 513,12	244 576 706,81
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>410 844 700,86</b>	<b>429 235 425,78</b>
Pendapatan Hibah	70 557 920,00	81 212 520,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	332 709 803,48	98 943 320,98
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	248 160 049,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7 576 977,38	919 535,80

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 385 711 569,00</b>	<b>1 398 937 421,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>56 764 977,00</b>	<b>62 353 561,00</b>
Pajak Daerah	18 384 783,00	19 861 797,00
Retribusi Daerah	1 383 814,00	1 830 633,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 924 887,00	4 626 354,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33 071 493,00	36 034 777,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 023 173 716,00</b>	<b>990 355 064,00</b>
Bagi Hasil Pajak	16 489 467,00	14 149 846,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 724 219,00	6 074 100,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	655 518 878,00	681 902 953,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	337 441 152,00	288 228 165,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>305 772 876,00</b>	<b>346 228 796,00</b>
Pendapatan Hibah	53 295 943,00	61 427 280,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	252 456 234,00	88 025 606,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	196 749 376,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20 699,00	26 534,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 228 883 918,00</b>	<b>1 188 271 650,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>67 129 956,00</b>	<b>82 379 613,00</b>
Pajak Daerah	19 836 334,00	25 900 833,00
Retribusi Daerah	1 530 350,00	1 244 629,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 078 120,00	3 089 662,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42 685 152,00	52 144 489,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>903 489 250,00</b>	<b>823 127 374,00</b>
Bagi Hasil Pajak	18 466 366,00	17 904 922,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15 435 304,00	5 709 085,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	612 112 587,00	639 431 562,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	257 474 993,00	160 081 805,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>258 264 712,00</b>	<b>282 764 663,00</b>
Pendapatan Hibah	44 718 589,00	49 725 305,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	213 546 123,00	92 247 064,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	127 242 125,00	131 102 381,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	9 689 913,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 285 923 925,08</b>	<b>1 279 708 279,53</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>58 265 161,93</b>	<b>65 808 842,72</b>
Pajak Daerah	24 664 796,09	28 562 590,49
Retribusi Daerah	5 232 815,02	11 117 343,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	410 196,35	947 382,23
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27 957 354,47	25 181 526,57
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>844 615 366,87</b>	<b>895 181 485,50</b>
Bagi Hasil Pajak	12 595 358,06	9 143 665,61
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 389 806,65	6 242 713,47
Dana Alokasi Umum ( DAU )	669 276 831,00	684 210 957,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	149 353 371,16	195 584 149,42
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>383 043 396,28</b>	<b>318 717 951,31</b>
Pendapatan Hibah	48 058 854,37	65 197 634,55
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	233 139 684,77	83 709 946,76
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	169 810 370,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	101 844 857,13	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 150 545 601,86</b>	<b>1 206 214 223,95</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>71 824 582,14</b>	<b>86 313 480,52</b>
Pajak Daerah	21 289 348,70	23 521 005,22
Retribusi Daerah	3 327 703,41	3 441 509,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 660 233,85	1 785 492,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45 547 296,18	57 565 473,10
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>842 346 040,38</b>	<b>859 198 408,36</b>
Bagi Hasil Pajak	9 953 425,65	7 218 112,24
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 470 569,13	5 734 632,01
Dana Alokasi Umum ( DAU )	621 967 450,00	639 677 501,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	196 954 595,59	206 568 163,11
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>236 374 979,34</b>	<b>260 702 335,07</b>
Pendapatan Hibah	43 819 268,75	46 865 952,57
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	61 031 350,59	84 268 963,50
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26 250 000,00	129 567 419,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	105 274 360,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>966 621 241,77</b>	<b>858 292 112,73</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>32 767 743,90</b>	<b>39 595 944,11</b>
Pajak Daerah	9 101 628,93	11 579 264,20
Retribusi Daerah	2 813 349,65	7 648 911,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 067 293,19	1 606 943,09
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19 785 472,13	18 760 825,35
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>615 640 647,75</b>	<b>632 875 492,47</b>
Bagi Hasil Pajak	16 787 209,61	15 815 944,04
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 436 651,52	6 199 692,47
Dana Alokasi Umum ( DAU )	446 272 067,00	455 225 458,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	139 144 719,62	155 634 397,96
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>195 545 790,12</b>	<b>185 820 676,15</b>
Pendapatan Hibah	24 402 320,00	170 842,95
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 476 410,12	70 072 815,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	13 809 071,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	87 417 060,00	101 767 947,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35 250 000,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>946 197 873,63</b>	<b>946 904 183,52</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>27 613 469,64</b>	<b>32 410 517,40</b>
Pajak Daerah	14 020 637,89	14 996 362,60
Retribusi Daerah	2 906 222,11	3 228 954,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 632 351,65	2 358 292,77
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9 054 257,98	11 826 907,93
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>725 406 877,46</b>	<b>661 079 127,84</b>
Bagi Hasil Pajak	11 797 096,29	10 377 368,09
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 876 195,83	5 439 583,68
Dana Alokasi Umum ( DAU )	463 478 442,00	488 530 984,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	237 255 143,34	156 731 192,07
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>193 177 526,53</b>	<b>253 414 538,27</b>
Pendapatan Hibah	34 002 020,30	53 006 226,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	79 775 225,31	80 693 362,33
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	27 722 014,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	435 000,00
Dana Desa	74 708 156,00	89 161 665,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4 692 124,92	2 396 270,94

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>775 333 888,14</b>	<b>831 574 978,36</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>23 481 041,77</b>	<b>29 323 369,73</b>
Pajak Daerah	6 415 256,31	7 189 278,67
Retribusi Daerah	2 880 782,31	3 252 732,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14 185 003,15	18 881 358,55
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>573 283 931,03</b>	<b>587 653 782,03</b>
Bagi Hasil Pajak	9 284 715,46	7 821 527,64
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 866 687,50	5 439 401,34
Dana Alokasi Umum ( DAU )	417 316 170,00	435 029 435,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	133 816 358,06	139 363 418,05
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>178 568 915,34</b>	<b>214 597 826,60</b>
Pendapatan Hibah	21 440 640,00	24 512 160,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	47 783 898,57	69 068 458,50
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 000 000,00	0,00
Dana Desa	98 950 576,10	121 008 708,10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	393 800,68	8 500,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018 - 2019**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 162 096 665,25</b>	<b>2 294 656 383,15</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>550 275 048,13</b>	<b>627 296 544,83</b>
Pajak Daerah	398 448 008,99	480 420 824,00
Retribusi Daerah	29 579 486,07	29 626 488,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 894 667,17	17 468 775,20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107 352 885,90	99 780 457,01
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 364 968 467,08</b>	<b>1 400 623 202,26</b>
Bagi Hasil Pajak	52 323 993,75	38 435 501,58
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 004 745,51	5 537 771,14
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 034 730 849,00	1 110 510 308,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	264 908 878,83	246 139 621,54
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>246 853 150,04</b>	<b>266 736 636,07</b>
Pendapatan Hibah	90 008 850,00	93 454 680,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	156 844 300,04	164 118 621,07
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	9 163 335,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>850 862 998,52</b>	<b>927 116 733,84</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>132 202 276,04</b>	<b>176 199 324,17</b>
Pajak Daerah	21 731 062,46	27 205 358,06
Retribusi Daerah	5 604 727,00	5 631 840,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 342 620,32	4 894 552,26
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100 523 866,26	138 467 573,20
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>624 067 025,41</b>	<b>641 899 006,68</b>
Bagi Hasil Pajak	13 904 585,73	10 198 622,88
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 876 195,83	5 324 897,83
Dana Alokasi Umum ( DAU )	455 732 157,00	476 738 335,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	141 554 086,86	149 637 150,96
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>94 593 697,07</b>	<b>109 018 403,00</b>
Pendapatan Hibah	15 546 960,00	15 908 400,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	75 069 016,48	71 063 330,41
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	20 768 002,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3 977 720,59	1 278 670,58

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>21 763 769 643,82</b>	<b>22 542 810 802,06</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1 755 317 338,90</b>	<b>2 061 454 861,22</b>
Pajak Daerah	804 624 549,81	971 504 417,08
Retribusi Daerah	82 320 783,92	97 686 179,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63 284 187,04	72 862 680,79
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	805 087 818,13	919 401 583,58
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>15 401 585 464,78</b>	<b>15 344 949 788,71</b>
Bagi Hasil Pajak	315 900 091,02	249 020 128,81
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	232 688 790,29	128 147 785,67
Dana Alokasi Umum ( DAU )	11 092 837 679,00	11 477 888 137,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	3 760 158 904,47	3 489 893 737,24
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4 606 866 840,14</b>	<b>5 136 406 152,13</b>
Pendapatan Hibah	905 984 781,44	1 073 976 696,51
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	2 185 859 411,97	1 465 984 813,30
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61 250 000,00	1 694 422 701,99
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11 000 000,00	3 235 000,00
Dana Desa	831 275 685,49	570 229 557,07
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	738 739 086,24	328 557 383,26

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 109 753 247,00</b>	<b>1 126 018 591,76</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>524 340 397,00</b>	<b>567 208 096,82</b>
Belanja Pegawai	340 802 447,00	365 240 722,06
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	509 851,00	0,00
Belanja Hibah	12 017 537,00	16 180 765,80
Belanja Bantuan Sosial	150 000,00	250 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 107 020,00	1 231 816,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	168 299 570,00	183 460 012,96
Belanja Tidak Terduga	1 453 972,00	844 780,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>585 412 850,00</b>	<b>558 810 494,94</b>
Belanja Pegawai	59 139 110,00	50 631 753,07
Belanja Barang dan Jasa	236 063 494,00	287 300 408,32
Belanja Modal	290 210 246,00	220 878 333,55

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 196 239 972,55</b>	<b>1 678 742 417,52</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>656 890 245,38</b>	<b>1 029 913 807,91</b>
Belanja Pegawai	571 588 271,59	595 604 313,78
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	83 076 562,99	46 013 658,60
Belanja Bantuan Sosial	282 000,00	957 863,72
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	3 904 146,81
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	382 649 390,00
Belanja Tidak Terduga	1 943 410,81	784 435,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>539 349 727,17</b>	<b>648 828 609,61</b>
Belanja Pegawai	99 371 378,13	87 071 154,46
Belanja Barang dan Jasa	267 689 656,16	320 064 754,12
Belanja Modal	172 288 692,88	241 692 701,03

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 974 462 579,60</b>	<b>2 148 229 745,79</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 135 556 474,22</b>	<b>1 227 378 291,91</b>
Belanja Pegawai	766 768 793,07	801 611 283,63
Belanja Bunga	5 379 289,34	3 113 345,19
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	21 596 946,00	30 616 868,00
Belanja Bantuan Sosial	342 500,00	10 902 559,50
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5 971 190,67	10 478 351,90
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	333 358 722,04	370 643 883,70
Belanja Tidak Terduga	2 139 033,10	12 000,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>838 906 105,38</b>	<b>920 851 453,88</b>
Belanja Pegawai	106 463 370,50	123 416 772,99
Belanja Barang dan Jasa	349 089 852,93	422 584 788,18
Belanja Modal	383 352 881,96	374 849 892,71

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 002 789 116,45</b>	<b>2 086 664 487,60</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 247 281 947,12</b>	<b>1 323 558 340,78</b>
Belanja Pegawai	840 753 460,21	858 136 886,21
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	800 000,00
Belanja Hibah	44 516 674,32	49 179 698,77
Belanja Bantuan Sosial	1 508 750,00	1 597 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4 891 497,00	5 492 391,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	355 433 805,60	406 974 457,10
Belanja Tidak Terduga	177 760,00	1 377 907,70
<b>Belanja Langsung</b>	<b>755 507 169,33</b>	<b>763 106 146,82</b>
Belanja Pegawai	83 107 480,69	78 305 483,81
Belanja Barang dan Jasa	386 969 018,97	480 248 806,56
Belanja Modal	285 430 669,67	204 551 856,45

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 600 914 765,68</b>	<b>2 529 103 615,74</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 532 375 227,24</b>	<b>1 582 067 174,34</b>
Belanja Pegawai	1 078 642 626,04	1 068 166 509,98
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	41 961 680,00	48 882 336,27
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7 635 341,18	7 929 178,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	402 635 580,02	456 111 025,62
Belanja Tidak Terduga	1 500 000,00	978 123,75
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1 068 539 538,44</b>	<b>947 036 441,40</b>
Belanja Pegawai	107 637 743,20	116 346 762,38
Belanja Barang dan Jasa	545 719 633,59	483 228 627,20
Belanja Modal	415 182 161,65	347 461 051,83

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 677 655 829,99</b>	<b>1 676 303 875,02</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 076 547 008,75</b>	<b>1 148 512 721,65</b>
Belanja Pegawai	711 642 967,69	756 849 383,06
Belanja Bunga	7 186 937,87	687 265,47
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	55 240 821,64	17 159 345,00
Belanja Bantuan Sosial	10 559 000,00	2 975 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	217 636,79	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	291 599 940,51	369 955 464,81
Belanja Tidak Terduga	99 704,25	886 263,31
<b>Belanja Langsung</b>	<b>601 108 821,23</b>	<b>527 791 153,37</b>
Belanja Pegawai	84 027 263,52	83 313 962,82
Belanja Barang dan Jasa	323 661 791,00	323 714 463,95
Belanja Modal	193 419 766,71	120 762 726,60

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 501 095 274,00</b>	<b>1 401 165 789,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>712 119 061,00</b>	<b>762 483 261,00</b>
Belanja Pegawai	456 599 914,00	479 525 538,00
Belanja Bunga	1 334 597,00	6 539 264,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	13 069 067,00	16 123 800,00
Belanja Bantuan Sosial	3 878 000,00	5 093 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 100 000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	234 953 983,00	254 820 816,00
Belanja Tidak Terduga	183 500,00	380 343,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>788 976 213,00</b>	<b>638 682 528,00</b>
Belanja Pegawai	17 887 179,00	14 184 768,00
Belanja Barang dan Jasa	305 104 298,00	326 531 195,00
Belanja Modal	465 984 736,00	297 966 565,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 182 413 914,00</b>	<b>1 190 187 623,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>620 848 361,00</b>	<b>665 622 794,00</b>
Belanja Pegawai	389 240 374,00	426 945 669,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	1 000 000,00
Belanja Hibah	15 093 107,00	22 836 300,00
Belanja Bantuan Sosial	3 337 600,00	4 879 600,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	212 552 365,00	209 696 190,00
Belanja Tidak Terduga	624 915,00	265 035,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>561 565 553,00</b>	<b>524 564 829,00</b>
Belanja Pegawai	64 104 516,00	66 323 292,00
Belanja Barang dan Jasa	266 540 218,00	320 661 929,00
Belanja Modal	230 920 819,00	137 579 608,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 340 200 547,61</b>	<b>1 270 047 767,99</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>690 627 872,36</b>	<b>738 829 008,22</b>
Belanja Pegawai	450 878 630,71	482 019 977,72
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	15 367 500,00	21 952 550,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	211 333 746,90	3 029 914,70
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	230 905 740,20
Belanja Tidak Terduga	13 047 994,75	920 825,60
<b>Belanja Langsung</b>	<b>649 572 675,25</b>	<b>531 218 759,77</b>
Belanja Pegawai	74 674 097,06	72 328 214,10
Belanja Barang dan Jasa	242 986 952,63	262 211 408,02
Belanja Modal	331 911 625,55	196 679 137,65

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 159 675 730,79</b>	<b>1 193 779 078,99</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>654 414 610,00</b>	<b>694 631 536,52</b>
Belanja Pegawai	454 028 731,46	470 921 442,13
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	18 150 533,85	19 938 400,00
Belanja Bantuan Sosial	6 950 750,00	4 693 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 071 440,08	2 596 852,93
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	173 210 397,61	196 481 341,47
Belanja Tidak Terduga	2 757,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>505 261 120,79</b>	<b>499 147 542,47</b>
Belanja Pegawai	51 115 613,47	57 833 260,39
Belanja Barang dan Jasa	243 684 446,08	252 334 849,86
Belanja Modal	210 461 061,23	188 979 432,22

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2018 - 2019**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>812 660 322,64</b>	<b>889 548 919,21</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>372 386 479,93</b>	<b>393 832 062,87</b>
Belanja Pegawai	195 018 380,17	211 935 458,85
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	80 000,00	0,00
Belanja Hibah	8 383 482,27	8 605 950,00
Belanja Bantuan Sosial	32 956 900,00	20 217 850,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	837 288,32
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	135 435 102,57	151 186 990,71
Belanja Tidak Terduga	512 614,91	1 048 525,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>440 273 842,72</b>	<b>495 716 856,34</b>
Belanja Pegawai	58 852 193,24	68 956 806,95
Belanja Barang dan Jasa	140 851 274,61	211 458 504,67
Belanja Modal	240 570 374,86	215 301 544,72

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2018 - 2019**

**(000 Rp)**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>871 114 514,51</b>	<b>958 598 521,94</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>286 073 677,29</b>	<b>429 081 910,76</b>
Belanja Pegawai	273 346 501,64	298 266 977,14
Belanja Bunga	1 285 710,00	3 224 933,58
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	10 396 978,07	10 648 977,01
Belanja Bantuan Sosial	107 000,00	6 590 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	1 068 454,06
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	937 487,59	109 282 068,98
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>585 040 837,22</b>	<b>529 516 611,18</b>
Belanja Pegawai	24 620 458,96	38 611 022,95
Belanja Barang dan Jasa	179 305 803,64	220 990 809,04
Belanja Modal	381 114 574,62	269 914 779,20

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>797 058 152,36</b>	<b>818 269 505,94</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>353 159 255,35</b>	<b>400 271 319,72</b>
Belanja Pegawai	189 415 710,88	209 123 552,81
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	9 989 355,00	15 407 253,42
Belanja Bantuan Sosial	7 610 893,50	7 352 036,05
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 063 495,20	748 183,20
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	144 194 800,77	166 415 294,24
Belanja Tidak Terduga	885 000,00	1 225 000,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>443 898 897,01</b>	<b>417 998 186,22</b>
Belanja Pegawai	61 326 754,93	63 465 961,17
Belanja Barang dan Jasa	152 870 696,22	177 481 191,11
Belanja Modal	229 701 445,86	177 051 033,94

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018 - 2019**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 190 205 773,41</b>	<b>2 190 661 163,23</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>916 343 556,35</b>	<b>965 431 296,43</b>
Belanja Pegawai	846 288 947,46	878 091 123,31
Belanja Bunga	15 537 458,76	15 223 964,42
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	49 493 407,49	58 115 459,42
Belanja Bantuan Sosial	2 372 500,00	9 841 250,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 171 220,00	1 174 259,78
Belanja Tidak Terduga	1 480 022,63	2 985 239,50
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1 273 862 217,06</b>	<b>1 225 229 866,81</b>
Belanja Pegawai	155 907 216,49	245 927 369,16
Belanja Barang dan Jasa	692 755 797,24	668 577 338,93
Belanja Modal	425 199 203,34	310 725 158,72

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>870 142 022,92</b>	<b>904 564 346,21</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>315 265 497,56</b>	<b>335 964 930,54</b>
Belanja Pegawai	306 492 173,90	322 844 097,05
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	6 679 917,11	9 277 604,10
Belanja Bantuan Sosial	0,00	1 745 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 893 842,55	2 055 734,39
Belanja Tidak Terduga	199 564,00	42 495,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>554 876 525,37</b>	<b>568 599 415,68</b>
Belanja Pegawai	41 883 683,48	41 387 148,05
Belanja Barang dan Jasa	288 531 544,66	317 687 319,43
Belanja Modal	224 461 297,23	209 524 948,20

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>21 286 381 763,52</b>	<b>22 119 420 822,25</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11 094 229 670,55</b>	<b>12 264 786 553,46</b>
Belanja Pegawai	7 871 507 929,80	8 225 282 934,71
Belanja Bunga	30 723 992,97	28 788 772,65
Belanja Subsidi	589 851,00	1 800 000,00
Belanja Hibah	405 033 569,73	390 938 966,39
Belanja Bantuan Sosial	70 055 893,50	77 095 659,27
Belanja Bagi Hasil kepada Provin- si/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	236 391 367,83	37 316 577,65
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 455 676 817,26	3 491 812 669,95
Belanja Tidak Terduga	24 250 248,45	11 750 972,86
<b>Belanja Langsung</b>	<b>10 192 152 092,97</b>	<b>9 854 634 268,79</b>
Belanja Pegawai	1 090 118 058,68	1 208 103 732,28
Belanja Barang dan Jasa	4 621 824 477,74	5 075 076 393,38
Belanja Modal	4 480 209 556,55	3 513 918 769,81

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>26 076 854,00</b>	<b>38 962 956,48</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>27 576 854,00</b>	<b>40 512 956,48</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27 576 854,00	40 512 956,48
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	1 550 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>40 512 956,90</b>	<b>35 251 996,91</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>16 149 803,42</b>	<b>22 446 885,90</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>16 149 803,42</b>	<b>25 146 885,90</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16 149 803,42	25 146 885,90
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2 700 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>25 009 993</b>	<b>55 668 991,00</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>86 810 529,48</b>	<b>165 493 725,62</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>110 971 651,88</b>	<b>189 654 848,02</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	110 742 341,88	189 640 858,02
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	229 310,00	13 990,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>24 161 122,40</b>	<b>24 161 122,40</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	24 161 122,40	24 161 122,40
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>189 705 023,02</b>	<b>296 856 316,68</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
2018 - 2019**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>101 202 014,14</b>	<b>149 844 298,31</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>101 202 014,14</b>	<b>149 844 298,31</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101 202 014,14	149 844 298,31
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>149 848 998,31</b>	<b>195 868 789,85</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>54 214 484,28</b>	<b>140 264 890,28</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>55 714 484,28</b>	<b>141 264 890,28</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55 714 484,28	139 955 278,08
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1 309 612,20
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>76 211 741,46</b>	<b>200 010 842,98</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>( 34 167 267,81)</b>	<b>( 34 990 084,44)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>28 841 791,05</b>	<b>7 015 954,80</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33 855 115,08	7 015 954,80
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	5 013 324,03	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>63 009 058,86</b>	<b>42 006 039,24</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	63 009 058,86	42 006 039,24
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>14 947 981,34</b>	<b>64 437 837,32</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>123 348 552,00</b>	<b>( 5 430 600,00)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>124 348 552,00</b>	<b>7 964 838,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25 185 042,00	7 964 838,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	99 163 510,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>13 395 438,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	12 395 438,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>7 964 847,00</b>	<b>( 7 658 968,00)</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>35 082 253,00</b>	<b>80 052 252,00</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>35 082 253,00</b>	<b>81 552 252,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35 082 253,00	81 552 252,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>81 552 257,00</b>	<b>78 136 279,00</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>57 942 575,80</b>	<b>3 526 824,10</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>59 592 575,80</b>	<b>3 526 824,10</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59 613 055,80	3 526 824,10
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	( 20 480,00)	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 650 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>3 665 953,27</b>	<b>13 187 335,64</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2018 - 2019**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>43 124 764,60</b>	<b>32 494 635,67</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>44 124 764,60</b>	<b>33 994 635,67</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44 124 764,60	33 994 635,67
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>33 994 635,67</b>	<b>44 929 780,62</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>81 971 285,51</b>	<b>113 703 761,27</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>81 971 285,51</b>	<b>113 703 761,27</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81 971 285,51	113 703 761,27
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeaan</b>	<b>235 932 204,64</b>	<b>82 446 954,79</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>42 282 561,96</b>	<b>66 529 970,69</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>42 282 561,96</b>	<b>69 893 740,48</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22 728 135,21	21 444 567,47
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	698 814,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	47 928 173,02
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	521 000,00
Penerimaan Piutang Daerah	18 855 612,75	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 769,79</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	2 863 769,79
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>21 522 466,56</b>	<b>54 835 632,26</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>81 130 752,61</b>	<b>54 906 488,39</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>81 130 752,61</b>	<b>59 406 488,39</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81 130 752,61	59 406 488,39
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	4 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>59 406 488,39</b>	<b>68 211 960,82</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>36 909 111,72</b>	<b>( 89 723 433,94)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>85 741 471,09</b>	<b>8 800 003,56</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10 408 821,79	8 800 003,56
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	75 332 649,30	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>48 832 359,38</b>	<b>98 523 437,50</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	34 076 500,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	14 755 859,38	59 023 437,50
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	39 500 000,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>8 800 003,56</b>	<b>14 271 785,97</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



**Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>104 868 459,93</b>	<b>83 632 524,28</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>106 368 459,93</b>	<b>85 632 524,28</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	106 333 051,65	85 589 435,53
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	43 088,75
Penerimaan Piutang Daerah	35 408,29	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	2 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>85 589 435,53</b>	<b>106 184 911,90</b>

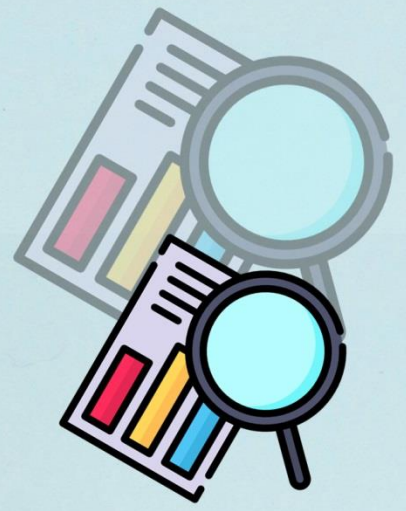
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2018 - 2019**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>867 014 342,70</b>	<b>721 191 657,11</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 011 166 883,33</b>	<b>1 017 914 901,54</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	811 817 774,97	968 099 037,58
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	698 814,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	75 332 649,30	49 237 785,22
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	229 310,00	578 078,75
Penerimaan Piutang Daerah	18 891 021,04	0,00
Lainnya	104 197 314,03	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>144 152 540,64</b>	<b>296 723 244,43</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	42 226 500,00	16 250 000,00
Pembayaran Pokok Utang	101 926 040,64	140 449 806,93
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	39 500 000,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>1 034 664 985,85</b>	<b>1 317 958 383,73</b>

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota





# LAMPIRAN GAMBAR





# APBD TAHUN ANGGARAN 2019

## PROVINSI LAMPUNG 2019



### REALISASI PENERIMAAN

APBD TAHUN 2019



TURUN  
4,19 %



SURPLUS



RP 336,13 JUTA

SILPA REALISASI  
APBD 2019

### REALISASI PENGELUARAN

APBD TAHUN 2019



TURUN  
8,49 %



BELANJA  
TIDAK LANGSUNG

TURUN  
1,39 %

BELANJA  
LANGSUNG

TURUN  
17,87 %





## DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Lampung. 2020. PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2015-2019.

<https://lampung.bps.go.id>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email: [bps1800@bps.go.id](mailto:bps1800@bps.go.id), Website: <http://lampung.bps.go.id>

ISSN 0126-4699



9 770126 469005